

RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

UNIT KERJA : PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN : 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah akses pengaduan pelayanan publik	1 Lokasi (Kab/Kota)			1		3 Bulan (Juli sd Sept)	Triwulan I: Triwulan II: Triwulan III: - Pelaksanaan akses pengaduan pelayanan publik Keasistenan PVL Ombudsman RI Tahun 2026. - Pembuatan laporan penyelesaian pembentukan akses pengaduan pelayanan publik Keasistenan PVL	Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan IV:	
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	228 Laporan	57	57	57	57	12 Bulan (Jan sd Des)	Triwulan I: Penyelesaian Laporan Masyarakat (Reguler/RCO) Triwulan II: Penyelesaian Laporan Masyarakat (Reguler/RCO) Triwulan III: Penyelesaian Laporan Masyarakat (Reguler/RCO) Triwulan IV: Penyelesaian Laporan Masyarakat (Reguler/RCO)	Keasistenan Pemeriksaan Laporan
	Jumlah laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI bersifat tematik	1 Laporan			1		3 Bulan (Juli sd Sept)	Triwulan I:	Keasistenan Pemeriksaan Laporan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
	dan selektif khusus Program Prioritas Presiden yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik							Triwulan II: - Triwulan III: - Persiapan, Pengambilan data dan Pelaksanaan Laporan IAPS Triwulan IV: -	
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah pemerintah daerah yang dinilai atas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	18 Pemerintah Daerah			18		3 Bulan (Juli sd Sept)	Triwulan I: – Penyampaian hasil penilaian Opini tahun 2025. – Persiapan penilaian Opini tahun 2026 Triwulan II: – Persiapan penilaian opini tahun 2026. – Sosialisasi kepada instansi yang akan dinilai (Pemda dan Instansi vertikal)	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan III: – Pengambilan data 18 Kabupaten/Kota dan Instnasi vertikal. – Input data Triwulan IV: – Input data – Supervisi Finalisasi data.	
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	0,15	0,25	0,35	0,25	12 Bulan (Jan sd Des)	Triwulan I: Penyusunan rencana dan pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan II: Pelaksaaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	RENCANA PENCAPAIAN KINERJA				RENCANA WAKTU PENYELESAIAN	RENCANA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV			
								Triwulan III: Pelaksanaan layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor Triwulan IV: Pelaksanaan dan evaluasi layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



M. Adrian Agustiansyah